

## ANALISIS MODEL REKRUITMEN MAHASISWA PENERIMA BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR (KIP)KULIAH DI UNIVERSITAS ISLAM JEMBER

AHMAD ZAINULLAH HASAN<sup>1</sup>, SYARKAWI<sup>2</sup>  
Universitas Islam Jember<sup>1</sup>, Universitas Pamulang<sup>2</sup>  
Email: zainulah.hasan889@gmail.com<sup>1</sup>

**Abstract:** Higher education serves as a fundamental pillar in developing competitive, ethical, and high-quality human resources. In accordance with Law No. 12 of 2012 on Higher Education, the Indonesian government is obligated to expand access and learning opportunities for all citizens. One of the strategic initiatives to achieve this goal is the Smart Indonesia Card for College (Kartu Indonesia Pintar – KIP Kuliah) program, which provides educational assistance to outstanding students from low-income families, enabling them to pursue higher education without financial burden. This study aims to analyze the recruitment model of KIP Kuliah scholarship recipients at the Islamic University of Jember and to evaluate its effectiveness based on the official guidelines of the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology. This research employs a qualitative approach with a case study design. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document analysis involving scholarship administrators, academic advisors, and student beneficiaries. Data were analyzed using the Miles, Huberman, and Saldaña interactive model, consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that the recruitment process for KIP Kuliah recipients at the Islamic University of Jember has been systematically implemented in accordance with national guidelines. The selection stages include administrative screening, academic potential tests, interviews, and additional assessments on Ahlussunnah wal Jama'ah theological understanding and Qur'an reading ability—reflecting the Islamic values embedded in the university's character education. The program has effectively enhanced access to higher education, fostered learning motivation, and promoted upward social mobility among students from economically disadvantaged backgrounds. Nevertheless, several challenges remain, such as mismatches between socioeconomic data and the Integrated Social Welfare Data (DTKS), limited digital literacy, and administrative complexity. Therefore, capacity building for program implementers, the development of data-driven selection systems, and continuous evaluation are crucial to ensure that the KIP Kuliah program becomes more transparent, accountable, and effectively targeted.

**Keywords:** Recruitment, Smart Indonesia Card (KIP Kuliah), Higher Education, Education Policy, Equity in Access.

**Abstrak:** Pendidikan tinggi merupakan pilar utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing dan berakhlak mulia. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi memiliki kewajiban untuk memperluas akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi. Salah satu kebijakan strategis dalam mewujudkan hal tersebut adalah program *Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah*, yaitu bantuan pendidikan bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu agar dapat menempuh pendidikan tinggi tanpa terbebani biaya kuliah dan biaya hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model rekrutmen mahasiswa penerima beasiswa KIP Kuliah di Universitas Islam Jember serta menilai efektivitas pelaksanaannya berdasarkan pedoman resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Penelitian ini menggunakan

pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap pihak pengelola beasiswa, dosen pembimbing, dan mahasiswa penerima KIP Kuliah. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses rekrutmen mahasiswa penerima KIP Kuliah di Universitas Islam Jember telah dilaksanakan secara sistematis dan sesuai pedoman nasional. Tahapan seleksi meliputi seleksi administrasi, tes potensi akademik, wawancara, serta tes kemampuan akidah Ahlussunnah wal Jama'ah dan membaca Al-Qur'an sebagai ciri khas lembaga pendidikan Islam. Program ini terbukti efektif dalam memperluas akses pendidikan tinggi, meningkatkan motivasi belajar, serta mendorong mobilitas sosial vertikal mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah. Namun demikian, masih ditemukan kendala berupa ketidaksesuaian data sosial ekonomi calon penerima dengan *Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)*, keterbatasan literasi digital, dan kompleksitas birokrasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas pelaksana, penyempurnaan sistem seleksi berbasis data, dan evaluasi berkelanjutan agar implementasi KIP Kuliah semakin transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

**Kata Kunci:** Rekrutmen, KIP Kuliah, Pendidikan Tinggi, Kebijakan Pendidikan, Pemerataan Akses.

### A. Pendahuluan

Pendidikan tinggi merupakan pilar strategis dalam membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul, berdaya saing, dan berakhlak mulia. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi memiliki fungsi utama untuk mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi insan yang beriman, bertakwa, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta berbudaya demi kepentingan bangsa. Perguruan tinggi juga diharapkan mampu menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang dapat berkontribusi terhadap kemajuan bangsa, peradaban, dan kesejahteraan umat manusia secara berkelanjutan.

Dalam konteks pembangunan nasional, pendidikan tinggi menjadi instrumen penting dalam mendorong terciptanya masyarakat yang berpengetahuan (*knowledge society*). Pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan berupaya memperluas akses pendidikan tinggi sebagai bentuk implementasi dari prinsip keadilan sosial dan pemerataan kesempatan belajar bagi seluruh warga negara. Namun demikian, realitas sosial-ekonomi di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan tinggi. Salah satu hambatan terbesar adalah keterbatasan ekonomi keluarga yang menyebabkan sebagian calon mahasiswa tidak mampu melanjutkan pendidikan setelah menyelesaikan sekolah menengah.

Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, pemerintah meluncurkan berbagai program bantuan biaya pendidikan, seperti Bidikmisi dan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Program KIP Kuliah merupakan pengembangan dari program Bidikmisi yang telah berjalan sejak tahun 2010 hingga 2019. Mulai tahun 2020, program ini diintegrasikan dalam satu kebijakan nasional di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi serta memperkuat pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

KIP Kuliah ditujukan bagi mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi agar dapat menempuh pendidikan tinggi tanpa terbebani oleh biaya kuliah maupun biaya hidup. Melalui program ini, diharapkan tidak ada lagi anak bangsa yang gagal mengenyam pendidikan tinggi karena alasan finansial. Program ini berlandaskan pada

nilai-nilai efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, kepatutan, dan kebermanfaatan sebagaimana tercantum dalam Pedoman Pelaksanaan Bantuan UKT/SPP Mahasiswa melalui Program KIP Kuliah Tahun 2020. Prinsip-prinsip tersebut menjadi acuan dalam seluruh tahapan pelaksanaan, mulai dari sosialisasi, pendaftaran, seleksi, penetapan penerima, hingga evaluasi pelaporan.

Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan publik di bidang pendidikan seringkali menghadapi berbagai kendala. Nugroho (2011) dalam Yuliah (2020) menegaskan bahwa efektivitas implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh lima faktor utama, yaitu ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksana, ketepatan target, ketepatan lingkungan, dan ketepatan proses. Dalam konteks KIP Kuliah, hal tersebut berarti sejauh mana kebijakan ini dijalankan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, siapa yang bertanggung jawab melaksanakannya, bagaimana proses seleksi dilakukan, dan apakah sasaran penerima benar-benar sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Jika salah satu faktor tidak terpenuhi, kebijakan tersebut berpotensi tidak efektif dan gagal mencapai tujuan pemerataan akses pendidikan.

Fenomena yang terjadi di Universitas Islam Jember memperlihatkan adanya tantangan dalam implementasi program KIP Kuliah. Berdasarkan hasil observasi awal, ditemukan sejumlah permasalahan dalam proses rekrutmen dan seleksi penerima beasiswa. Misalnya, terdapat mahasiswa penerima KIP Kuliah yang tidak sepenuhnya memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, seperti berasal dari keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan tingkat kesejahteraan relatif baik, atau mahasiswa dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) di bawah standar minimal yang ditentukan (2,75 bagi perguruan tinggi swasta). Fenomena tersebut menunjukkan adanya celah dalam sistem verifikasi dan validasi data calon penerima manfaat, serta potensi ketidaktepatan sasaran program. Selain itu, keterbatasan koordinasi antarunit pelaksana di tingkat universitas, seperti bagian kemahasiswaan, biro keuangan, dan fakultas, turut menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pendaftaran serta minimnya sosialisasi dari pihak perguruan tinggi menyebabkan banyak calon mahasiswa yang berhak tidak mengetahui atau gagal memanfaatkan peluang beasiswa tersebut. Kompleksitas administratif juga menjadi kendala tersendiri, terutama bagi calon penerima dari wilayah pedesaan dengan akses informasi yang terbatas.

Imron (2008) dalam Yuliah (2020) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan dipengaruhi oleh kompleksitas kebijakan, kejelasan rumusan, kapasitas pelaksana, dukungan masyarakat, dan efisiensi birokrasi. Dalam kasus KIP Kuliah di Universitas Islam Jember, faktor-faktor tersebut tampak belum berjalan optimal. Kapasitas petugas pelaksana dalam melakukan seleksi dan verifikasi data masih perlu diperkuat melalui pelatihan dan peningkatan sistem informasi yang terintegrasi. Demikian pula, kejelasan pedoman teknis di tingkat perguruan tinggi sering kali masih multitafsir, terutama dalam menilai kelayakan ekonomi calon penerima manfaat.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan dengan realitas empiris pelaksanaannya. Secara normatif, KIP Kuliah diharapkan mampu mendorong pemerataan akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa kurang mampu. Namun secara empiris, masih terdapat ketidaktepatan sasaran dan lemahnya mekanisme seleksi yang berpotensi mengurangi efektivitas program. Dengan demikian, diperlukan suatu kajian sistematis mengenai bagaimana model rekrutmen mahasiswa penerima beasiswa KIP Kuliah diterapkan di Universitas Islam Jember, serta sejauh mana implementasi tersebut telah sesuai dengan pedoman resmi Kemendikbudristek.

Penelitian ini memiliki urgensi akademik dan praktis. Secara akademik, hasil penelitian dapat memperkaya literatur tentang implementasi kebijakan pendidikan tinggi, khususnya dalam konteks kebijakan afirmatif pemerintah terhadap kelompok masyarakat kurang mampu. Analisis yang mendalam terhadap mekanisme rekrutmen dan seleksi penerima beasiswa akan memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori implementasi kebijakan, terutama yang berkaitan dengan efektivitas kebijakan sosial dan pendidikan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak universitas dan pemerintah dalam memperbaiki mekanisme pelaksanaan KIP Kuliah agar lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Temuan penelitian dapat menjadi dasar bagi penyusunan model rekrutmen yang lebih efisien dan adaptif terhadap dinamika sosial ekonomi mahasiswa. Dengan demikian, tujuan utama KIP Kuliah untuk membuka akses pendidikan tinggi yang inklusif dan berkeadilan dapat benar-benar terwujud.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis model rekrutmen mahasiswa penerima beasiswa KIP Kuliah di Universitas Islam Jember, dengan tujuan menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan rekomendasi perbaikan sistem implementasi di tingkat institusional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas tata kelola program bantuan pendidikan di perguruan tinggi serta memperkuat komitmen pemerintah dalam membangun pendidikan tinggi yang berkeadilan, berkualitas, dan berkelanjutan.

## **B. Metode Penelitian**

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh berbagai subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa (Syarkawi & Maulana, M.A, 2025). Dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan memahami secara mendalam proses dan mekanisme rekrutmen mahasiswa penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di Universitas Islam Jember. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya menggali makna, persepsi, serta pengalaman para pelaksana dan penerima manfaat dalam konteks implementasi kebijakan pendidikan. Jenis studi kasus digunakan untuk menelaah fenomena khusus secara intensif dalam konteks yang terbatas (*bounded system*), sebagaimana dijelaskan oleh Yin (2018). Subjek penelitian terdiri atas pihak pelaksana kebijakan (pimpinan universitas dan staf kemahasiswaan), mahasiswa penerima KIP Kuliah, serta dosen pembimbing akademik yang terlibat dalam proses verifikasi. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, dan data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, serta studi dokumentasi guna memperoleh informasi yang valid dan menyeluruh.

Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Proses analisis dilakukan secara simultan dengan pengumpulan data untuk menemukan pola, makna, dan hubungan yang muncul di lapangan. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan metode, serta penerapan prinsip kredibilitas, dependabilitas, transferabilitas, dan konfirmabilitas sebagaimana dikemukakan oleh Lincoln dan Guba (1985). Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif tentang efektivitas model rekrutmen KIP Kuliah di Universitas Islam Jember serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan ketepatan sasaran program dalam konteks implementasi kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia.

### C. Pembahasan

Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah merupakan salah satu strategi utama pemerintah Indonesia dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat dari keluarga kurang mampu. Program ini menjadi perwujudan dari amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi. Dalam kerangka kebijakan nasional, KIP Kuliah tidak hanya diposisikan sebagai bantuan finansial, tetapi juga sebagai instrumen pemerataan kesempatan belajar dan mobilitas sosial. Oleh karena itu, pembahasan terhadap implementasi KIP Kuliah, terutama dalam konteks Universitas Islam Jember, penting dilakukan untuk memahami sejauh mana prinsip keadilan sosial dan meritokrasi dapat diwujudkan dalam praktik kebijakan pendidikan tinggi. Secara historis, KIP Kuliah merupakan kelanjutan dari program Beasiswa Bidikmisi yang diluncurkan pada tahun 2010. Pergeseran menuju KIP Kuliah pada tahun 2020 merefleksikan perubahan paradigma kebijakan bantuan pendidikan yang lebih menyeluruh dan integratif. Bila Bidikmisi berfokus pada pembiayaan mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin, KIP Kuliah mengintegrasikan beberapa program perlindungan sosial seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga Harapan (PKH), serta Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Integrasi ini memperlihatkan adanya upaya pemerintah untuk membangun sinergi lintas sektor antara bidang pendidikan dan kesejahteraan sosial.

Pendekatan integratif tersebut menunjukkan adanya orientasi kebijakan yang tidak hanya menargetkan penerima berdasarkan kondisi ekonomi, tetapi juga memperhatikan riwayat sosial dan rekam partisipasi dalam program perlindungan sosial lainnya. Dengan demikian, KIP Kuliah menjadi simbol dari pendekatan kebijakan berbasis keadilan distributif, di mana alokasi sumber daya publik diarahkan kepada kelompok yang paling membutuhkan berdasarkan data kesejahteraan terukur melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Universitas Islam Jember (UIJ) menjadi salah satu perguruan tinggi swasta yang konsisten melaksanakan kebijakan KIP Kuliah sejak program Bidikmisi masih berlaku. Peningkatan jumlah penerima KIP Kuliah dari tahun ke tahun menunjukkan antusiasme dan efektivitas sosialisasi yang dilakukan oleh pihak universitas. Implementasi kebijakan ini tidak hanya berkaitan dengan proses administratif pemberian bantuan, tetapi juga dengan sistem rekrutmen, verifikasi, serta pembinaan terhadap penerima.

Tahapan rekrutmen mahasiswa penerima KIP Kuliah di Universitas Islam Jember dilaksanakan secara berlapis, mulai dari seleksi administrasi, tes potensi akademik, hingga wawancara. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa penerima benar-benar memenuhi kriteria baik secara ekonomi maupun akademik. Selain mengacu pada pedoman nasional KIP Kuliah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristekdikti), UIJ juga mengembangkan mekanisme tambahan sesuai dengan karakteristik lembaga, yaitu tes kemampuan akidah Ahlussunnah wal Jama'ah serta kemampuan membaca Al-Qur'an. Penambahan kriteria tersebut mencerminkan integrasi nilai-nilai keislaman dalam kebijakan pendidikan tinggi di bawah naungan lembaga pendidikan Islam. Pendekatan ini memperlihatkan komitmen universitas dalam menjaga keseimbangan antara kecakapan akademik dan moralitas spiritual mahasiswa penerima beasiswa. Secara konseptual, langkah ini sejalan dengan pandangan Tilaar (2012) bahwa pendidikan di Indonesia harus berlandaskan nilai-nilai humanis religius untuk membentuk sumber daya manusia yang berintegritas.

Salah satu aspek penting dalam keberhasilan implementasi KIP Kuliah adalah strategi sosialisasi. Di Universitas Islam Jember, sosialisasi dilakukan melalui pendekatan kolaboratif dengan jaringan sekolah-sekolah di bawah LP Ma'arif NU dan sejumlah pesantren di wilayah Jember dan sekitarnya. Strategi ini efektif karena mengandalkan jaringan sosial berbasis komunitas yang memiliki kedekatan emosional dan nilai-nilai keagamaan yang sama. Pendekatan berbasis komunitas tersebut sesuai dengan teori Diffusion of Innovations oleh Everett Rogers (2003), yang menjelaskan bahwa adopsi program atau kebijakan baru akan lebih efektif bila informasi disebarkan melalui saluran komunikasi yang memiliki kredibilitas tinggi dan kesamaan nilai dengan penerima informasi. Dalam konteks ini, peran pesantren dan lembaga pendidikan Islam menjadi kunci keberhasilan dalam memperluas jangkauan calon penerima KIP Kuliah. Selain itu, proses pendaftaran dilakukan secara online melalui laman resmi [kip-kuliah.kemdikbud.go.id](http://kip-kuliah.kemdikbud.go.id), yang menunjukkan adanya transformasi digital dalam sistem seleksi beasiswa. Namun, digitalisasi ini juga menghadirkan tantangan, khususnya bagi calon mahasiswa dari daerah dengan keterbatasan akses internet atau literasi digital. Beberapa informan penelitian mengungkapkan bahwa proses pengumpulan berkas dan pengisian data daring seringkali membingungkan dan membutuhkan pendampingan. Oleh karena itu, peran universitas dalam memberikan bimbingan teknis sangat penting agar prinsip inklusivitas digital dalam program KIP Kuliah benar-benar terwujud.

Dari sisi faktor pendukung, keberhasilan pelaksanaan KIP Kuliah di Universitas Islam Jember ditopang oleh tiga hal utama. Pertama, adanya komitmen kelembagaan yang kuat dari pimpinan universitas dan pengelola beasiswa. Komitmen ini terlihat dari upaya berkelanjutan dalam melakukan sosialisasi, pembinaan, dan evaluasi terhadap mahasiswa penerima. Kedua, dukungan kebijakan nasional yang jelas, baik dalam hal mekanisme pembiayaan maupun panduan pelaksanaan. Ketiga, partisipasi aktif masyarakat dan lembaga mitra pendidikan yang membantu menjaring calon penerima dari berbagai latar belakang sekolah. Namun, di sisi lain, terdapat sejumlah hambatan yang masih dihadapi. Salah satu kendala utama adalah ketidaksesuaian data sosial ekonomi calon penerima dengan data yang terdaftar di DTKS, sehingga beberapa calon mahasiswa yang sebenarnya layak tidak dapat diverifikasi sebagai penerima. Hambatan lain berkaitan dengan keterbatasan literasi digital dan birokrasi administratif yang dianggap cukup kompleks. Kompleksitas ini berdampak pada munculnya persepsi negatif di kalangan calon mahasiswa yang merasa kesulitan dalam mengikuti proses pendaftaran.

Hasil wawancara dengan mahasiswa penerima KIP Kuliah menunjukkan bahwa program ini memiliki dampak yang signifikan terhadap keberlanjutan studi dan peningkatan kesejahteraan mahasiswa. Seluruh informan mengakui bahwa bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup sangat membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Secara sosiologis, KIP Kuliah berperan sebagai mekanisme mobilitas sosial vertikal, di mana mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah memiliki peluang untuk naik kelas sosial melalui pendidikan tinggi.

Temuan ini sejalan dengan teori modal sosial oleh Pierre Bourdieu (1986), yang menjelaskan bahwa pendidikan merupakan bentuk investasi modal budaya yang dapat dikonversi menjadi modal ekonomi di masa depan. Melalui KIP Kuliah, mahasiswa memperoleh akses terhadap pendidikan, jaringan sosial, dan pengalaman akademik yang memperkuat daya saing mereka di dunia kerja. Dengan demikian, program ini tidak hanya memberikan bantuan finansial jangka pendek, tetapi juga menciptakan nilai sosial jangka panjang dalam bentuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Universitas Islam Jember menerapkan mekanisme evaluasi dan pembinaan berkelanjutan terhadap mahasiswa penerima KIP Kuliah. Evaluasi dilakukan setiap semester melalui pemantauan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dengan batas minimum 2,75. Mahasiswa yang mengalami penurunan prestasi dua kali

berturut-turut akan mendapatkan pembinaan akademik melalui bimbingan intensif. Namun, apabila penurunan tersebut terus berlanjut hingga tiga kali, maka beasiswa dapat dicabut sesuai kebijakan universitas.

Pendekatan pembinaan ini bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga edukatif. Pengelola KIP Kuliah memberikan pendampingan motivasi, pelatihan soft skills, dan pembinaan karakter bagi mahasiswa penerima. Langkah ini bertujuan agar penerima beasiswa tidak hanya berprestasi dalam bidang akademik, tetapi juga memiliki kompetensi personal dan sosial yang baik. Kebijakan pembinaan ini selaras dengan prinsip continuous quality improvement (perbaikan mutu berkelanjutan) dalam manajemen pendidikan tinggi (Tampubolon, 2020). Dengan evaluasi yang sistematis, universitas dapat memastikan bahwa bantuan negara benar-benar memberikan hasil optimal dan tidak disalahgunakan.

Dari hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi KIP Kuliah di Universitas Islam Jember telah berjalan cukup efektif dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan. Namun, efektivitas ini belum sepenuhnya lepas dari kendala struktural dan teknis. Kompleksitas birokrasi dan digitalisasi sistem pendaftaran masih menjadi tantangan yang perlu diantisipasi dengan pendekatan adaptif. Keterlibatan implementator yakni Pemerintah dalam implementasi kebijakan tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal tersebut ditengarai karena pelaksana yang ditugaskan tidak memiliki kapasitas yang mumpuni untuk mengelola sebuah program (Maulana, M. A., & Syarkawi, S, 2025). Selain itu, keberhasilan implementasi KIP Kuliah tidak hanya dapat diukur dari jumlah penerima atau kelancaran administrasi, tetapi juga dari output dan outcome jangka panjang, yakni sejauh mana penerima mampu menyelesaikan studi tepat waktu, memperoleh pekerjaan yang layak, serta berkontribusi terhadap masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi ke depan perlu dilakukan secara longitudinal agar dapat mengukur dampak sosial dan ekonomi secara komprehensif.

Dari sisi teoritis, penelitian ini memperkuat konsep bahwa kebijakan pendidikan tinggi berbasis beasiswa seperti KIP Kuliah berfungsi sebagai instrumen keadilan sosial (social justice instrument). Program ini mendukung teori redistribusi yang dikemukakan oleh John Rawls (1971) dalam *A Theory of Justice*, di mana keadilan sosial tercapai jika sumber daya dialokasikan untuk meningkatkan posisi kelompok paling kurang beruntung. Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas program beasiswa. Perguruan tinggi perlu meningkatkan sistem seleksi berbasis data, memperkuat literasi digital calon penerima, serta memperluas jejaring sosialisasi hingga ke daerah-daerah tertinggal.

#### **D. Penutup**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa model rekrutmen mahasiswa penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di Universitas Islam Jember telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristekdikti). Proses seleksi dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan, yaitu seleksi administrasi, tes potensi akademik, wawancara, serta tes kemampuan akidah Ahlul-sunnah wal Jama'ah dan membaca Al-Qur'an sebagai ciri khas institusi pendidikan Islam. Mekanisme ini menunjukkan adanya integrasi antara standar akademik nasional dan nilai-nilai keislaman yang menjadi landasan karakter universitas.

Secara umum, pelaksanaan KIP Kuliah di Universitas Islam Jember berjalan efektif dan akuntabel, ditandai dengan adanya komitmen kelembagaan, dukungan kebijakan nasional, dan partisipasi aktif masyarakat pendidikan. Program ini terbukti memberikan dampak positif

terhadap peningkatan akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu serta berperan dalam mendorong mobilitas sosial vertikal melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya kendala struktural dan teknis, seperti ketidaksesuaian data sosial ekonomi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), keterbatasan literasi digital calon penerima, serta kompleksitas birokrasi dalam proses pendaftaran. Faktor-faktor ini perlu diantisipasi dengan peningkatan kapasitas pelaksana, penyederhanaan sistem verifikasi, dan pendampingan teknis bagi calon penerima dari daerah dengan akses informasi terbatas.

Dari perspektif teoritis, penelitian ini menegaskan bahwa KIP Kuliah merupakan instrumen keadilan sosial (social justice instrument) yang sejalan dengan teori redistribusi John Rawls (1971) dan konsep modal sosial Pierre Bourdieu (1986). Program ini tidak hanya bersifat bantuan finansial, tetapi juga menjadi sarana pembangunan modal manusia dan sosial dalam jangka panjang. Oleh karena itu, ke depan diperlukan penguatan sinergi antara pemerintah pusat, perguruan tinggi, dan masyarakat, pengembangan sistem seleksi berbasis data yang transparan, serta evaluasi longitudinal terhadap dampak sosial dan ekonomi penerima beasiswa. Dengan langkah-langkah tersebut, implementasi KIP Kuliah dapat semakin efektif dalam mewujudkan pendidikan tinggi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

### Daftar Pustaka

- Bourdieu, P. (1986). *The forms of capital*. In J. Richardson (Ed.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education* (pp. 241–258). Greenwood Press.  
<https://doi.org/10.4324/9781315182933-16>
- Imron, A. (2008). *Kebijaksanaan pendidikan di Indonesia: Proses, produk, dan masa depannya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2018). *Petunjuk teknis program Bidikmisi rekrutmen baru perguruan tinggi keagamaan Islam swasta tahun 2018*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). *Pedoman pendaftaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) tahun 2021*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage Publications.  
[https://doi.org/10.1016/0147-1767\(85\)90062-8](https://doi.org/10.1016/0147-1767(85)90062-8)
- Maulana, M. A., & Syarkawi, S. (2025). ANALISIS PERAN AKTOR DALAM IMPLEMENTASI AKSESIBILITAS KERJA BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. *Ensiklopedia of Journal*, 7(2), 374-386.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2004). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. D. (2011). *Public policy: Dinamika kebijakan, analisis kebijakan, manajemen kebijakan* (Edisi ketiga revisi). Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.  
<https://doi.org/10.2307/j.ctvkjb25m>
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations* (5th ed.). Free Press.
- Syarkawi, S., & Maulana, M. A. (2025). ISU GENDER DALAM MANAJEMEN BENCANA DAN LINGKUNGAN DI INDONESIA. *Ensiklopedia Social Review*, 7(1), 141-147.

- Tampubolon, D. P. (2020). Continuous quality improvement dalam manajemen pendidikan tinggi. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 27(2), 123–135. <https://doi.org/10.17509/jap.v27i2.28250>
- Tilaar, H. A. R. (2012). *Kebijakan pendidikan: Kajian strategis dalam pendidikan nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications.
- Yuliah, E. (2020). Implementasi kebijakan pendidikan. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, 30(2), 129–153. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4076190>